



**P E N E T A P A N**

**Nomor 1870/Pdt.P/2023/PA.Srg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Arjam bin Asmin**, umur 58 tahun, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Kampung Baru Rumah Tiga RT 007 RW 003 Desa Sukanegara Kecamatan Pontang Kabupaten Serang, selanjutnya disebut “ **Pemohon I** ”;

**Sarifah binti Saripan**, umur 0 tahun, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Baru Rumah Tiga RT 007 RW 003 Desa Sukanegara Kecamatan Pontang Kabupaten Serang, selanjutnya disebut “ **Pemohon II** ”;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang Nomor 1870/Pdt.P/2023/PA.Srg pada tanggal yang sama, mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa para Pemohon telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 14 Juli 2003, menurut ketentuan syariat Islam dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontang dengan wali nikah Ayah Kandung bernama Saripan, dan yang mengakadnikahkan adalah penghulu bernama Ustad H. Hamzah, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama

*Hal. 1 dari 5, Penetapan No. 1870/Pdt.P/2023/PA.Srg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rapiudin bin Samad dan Ratiman bin Wasman, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus Duda dalam usia 58 tahun, dan Pemohon II berstatus Janda dalam usia 0 tahun, selama perkawinan para Pemohon tidak pernah bercerai;
  3. Bahwa setelah perkawinan tersebut para Pemohon hidup berumah tangga tinggal di Kampung Baru Rumah Tiga RT 007 RW 003 Desa Sukanegara Kecamatan Pontang Kabupaten Serang sampai dengan sekarang;
  4. Bahwa para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
  5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
  6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
  7. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di kantor urusan agama kecamatan setempat;
  8. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) ini untuk pembuatan buku nikah, keperluan mengurus pembuatan akta kelahiran anak dan agar perkawinan para Pemohon dapat disahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  9. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Serang Cq. Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- b. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Arjam bin Asmin**) dengan Pemohon II (**Sarifah binti Saripan**) yang dilaksanakan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontang, pada tanggal 14 Juli 2003;
- c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 5, Penetapan No. 1870/Pdt.P/2023/PA.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009., Pengadilan Agama Serang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Bahwa para Pemohon tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas para Pemohon tidak bersungguh-sungguh beracara dimuka persidangan, maka permohonan para Pemohon digugurkan dan perintah kepada Panitera Pengadilan Agama Serang untuk mencoret dari daftar perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

*Hal. 3 dari 5, Penetapan No. 1870/Pdt.P/2023/PA.Srg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Perkara Nomor 1870/Pdt.P/2023/PA.Srg tersebut gugur;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Serang untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk Membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 345.000.00,- ( Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah );

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 oleh Drs. H. Surisman sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut telah dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ramadhona Daulay, S.Ag.,S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta tanpa dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

ttd

**Drs. H. Surisman**

Panitera Pengganti

ttd

**Ramadhona Daulay, S.Ag.,S.H.,M.H..**

*Hal. 4 dari 5, Penetapan No. 1870/Pdt.P/2023/PA.Srg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp	75.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp	200.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Biaya redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	345.000,00

Terbilang (Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)

Hal. 5 dari 5, Penetapan No. 1870/Pdt.P/2023/PA.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)